

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi juga informasi yang deras di Era Society 5.0 mengharuskan semua elemen masyarakat, termasuk para profesional dan akademisi di bidang akuntansi, untuk terus beradaptasi. Transformasi digital bukan hanya memodifikasi metode informasi keuangan disajikan, namun juga bagaimana data dianalisis dan dilaporkan secara real-time melalui sistem otomatis dan berbasis cloud. Maka dari itu, krusial bagi mahasiswa akuntansi guna mempersiapkan diri menghadapi tantangan ini agar tidak tertinggal oleh perkembangan zaman. Sebagai contoh, Program Studi Akuntansi Universitas Gadjah Mada (UGM) menggelar kuliah umum bertajuk *“Digital Accounting and the Future of Financial Reporting in Society 5.0”* yang menghadirkan pembicara dari Direktorat Jenderal Pajak untuk menyiapkan mahasiswa dengan ilmu dan kompetensi yang relevan dalam menempuh era digital. Tema ini dipilih sebagai respons dari civitas pendidikan dalam menyongsong Era 5.0, yang tidak hanya menghadirkan tantangan di bidang teknologi dan informasi, tetapi juga menuntut kemampuan untuk mengkolaborasikan serta memanfaatkan teknologi demi kemajuan peradaban manusia. Perkembangan internet dan teknologi yang begitu pesat kini menghadirkan efek signifikan terhadap kehidupan masyarakat, baik di perkotaan atau di pedesaan.

Pemahaman terkait keuangan digital sangat penting karena seperti halnya inovasi teknologi lainnya. Inovasi teknologi di sektor keuangan tidak hanya

menawarkan manfaat berupa kemudahan, kecepatan, dan keekonomisan bagi pengguna tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko. Maka dari itu dibutuhkan kecakapan seseorang guna mengetahui, menelaah, mengatur, serta mengkomunikasikan permasalahan finansial. Oleh karena perkembangan inovasi teknologi, literasi keuangan juga berkembang menjadi literasi keuangan digital. Literasi keuangan digital diartikan selaku taraf pemahaman seseorang terkait segala hal yang berhubungan dengan literasi keuangan dengan memakai bantuan teknologi digital. Tingkat pemahaman yang dimaksudkan yaitu pemahaman terkait pembelian daring, pembayaran daring dengan beragam mode pembayaran, serta sistem perbankan digital (Rahayu et al., 2022).

Begitu pun dalam hal permodalan, jika dulunya masyarakat kesulitan dalam mendapatkan pinjaman kini untuk mendapatkan pinjaman uang begitu mudah. Contoh hal yang mempermudah hal ini ialah hadirnya *platform* penyedia jasa pinjaman secara digital atau umumnya dikenal pinjaman *online* (pinjol). Menurut berita dari (Dewayani, 2021) dalam dua tahun terakhir, 75% dari populasi masyarakat dewasa yang ada di Indonesia dapat menjangkau layanan institusi finansial, serta masyarakat pun secara masif mendayagunakan jasa *fintech* untuk meraih tujuan finansial. Dibalik kemudahan yang ditawarkan oleh pinjol banyak efek negatif dibaliknya. Seperti bunga pinjaman yang tinggi, jumlah pinjaman yang diterima tidak sesuai pengajuan, penyebaran foto melalui aplikasi telekomunikasi kepada teman dan keluarga, hingga pengancaman melalui telfon.

(Kurniawan, 2021) merespons banyaknya korban akibat pinjaman *online*, Presiden melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi serta Otoritas Jasa Keuangan melangsungkan moratorium atau penundaan perilisan izin *fintech* legal serta penyelenggara sistem elektronik pinjaman *online*. Mengingat syarat dan kemudahan dalam melakukan pinjaman *online*, serta faktor yang mendorong masyarakat untuk melakukan pinjaman *online* adalah kebutuhan ekonomi masyarakat dan konsumsi masyarakat digital yang berlebihan. Hal ini disokong dengan perkembangan uang digital yang begitu pesat dan perilaku konsumtif dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

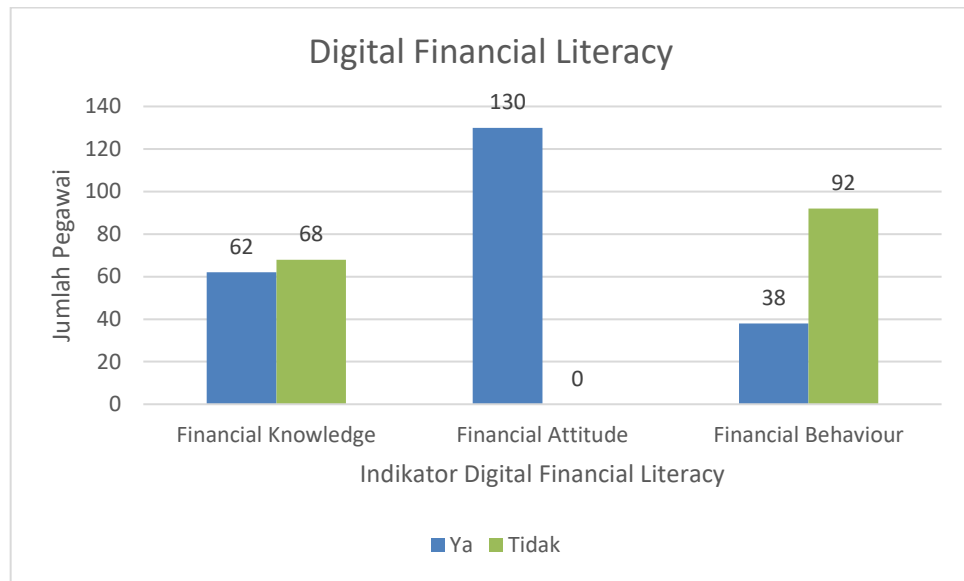
Fenomena maraknya pinjaman online yang seringkali menjerat masyarakat dalam lingkaran utang menunjukkan masih rendahnya tingkat literasi keuangan di berbagai kalangan. Menurut Lusardi dan Mitchell (2014), literasi keuangan merupakan kemampuan dasar yang sangat penting dalam mengambil keputusan ekonomi yang bijak, terutama pada era digital yang menawarkan kemudahan transaksi, termasuk akses terhadap pinjaman berbasis teknologi. Ketidaksiapan masyarakat dalam memahami risiko finansial yang tersembunyi di balik kemudahan tersebut ialah rintangan serius untuk pemerintah daerah atau lembaga terkait dalam meningkatkan edukasi serta pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat literasi keuangan digital, khususnya melalui lembaga pemerintahan yang memiliki mandat langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991) menguraikan bahwasanya perilaku individu, termasuk pada konteks keuangan digital, terimbas dari tiga

komponen utama, yakni sikap terhadap perilaku, norma subjektif, serta persepsi kontrol atas perilaku tersebut. Dalam konteks literasi keuangan digital, teori ini menekankan bahwa pemahaman terhadap konsep keuangan tidak otomatis mendorong individu untuk mengadopsi perilaku keuangan yang bijak, apabila tidak didukung oleh sikap positif, tekanan sosial yang mendukung, serta keyakinan bahwa dirinya mampu menggunakan teknologi keuangan dengan baik. Temuan pra-penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara pengetahuan tentang istilah dan fitur dalam layanan keuangan digital dengan perilaku aktual dalam mengelola keuangan secara digital. Hal ini menunjukkan pentingnya membangun sikap positif terhadap penggunaan teknologi finansial, memperkuat dukungan sosial di lingkungan kerja, serta meningkatkan rasa percaya diri individu dalam mengelola keuangan digital. Dengan demikian, pendekatan peningkatan literasi keuangan digital harus mencakup tidak hanya aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif dan konatif, agar terjadi perubahan perilaku keuangan yang kian adaptif serta bertanggung jawab di era digital.

Dalam konteks Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, permasalahan terkait literasi keuangan digital juga dapat terlihat di kalangan karyawannya. Wawancara penulis dengan bagian kepegawaian Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur pada 30 Januari 2025 mengatakan bahwa karyawan dengan gaya hidup konservatif atau kurang terbuka terhadap perubahan teknologi mungkin merasa kesulitan untuk memanfaatkan layanan keuangan digital, seperti aplikasi manajemen keuangan atau sistem e-banking, dalam mendukung tugas sehari-hari.

Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur merupakan sub kerja yang memiliki fungsi utama dalam merumuskan dan mengoordinasikan kebijakan daerah yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fungsi tersebut diwujudkan melalui program-program di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan, serta pemberdayaan masyarakat. Di tengah pesatnya transformasi digital, biro ini turut berperan dalam mendukung peningkatan literasi digital dan literasi keuangan masyarakat, khususnya agar mereka mampu memanfaatkan teknologi secara bijak dan terhindar dari risiko penyalahgunaan layanan keuangan digital. Fenomena rendahnya literasi keuangan digital di berbagai kelompok masyarakat telah menyebabkan banyak kasus penyalahgunaan aplikasi pinjaman online, penipuan berbasis digital, serta kesulitan dalam mengelola transaksi keuangan melalui platform digital. Masalah ini tidak terlepas dari berbagai faktor yang memengaruhi kemampuan masyarakat dalam memahami keuangan digital, yaitu faktor psikografis, seperti gaya hidup konsumtif dan sikap terhadap teknologi, serta faktor demografis, seperti tingkat pendidikan dan pendapatan. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat mengenai kedua faktor tersebut sangat penting untuk menyusun kebijakan dan program edukasi yang kian efisien, sehingga masyarakat dapat mengembangkan literasi keuangan digital mereka dan beradaptasi dengan dinamika ekonomi berbasis teknologi secara lebih bijaksana.



Gambar 1.1 Indikasi Terjadinya Digital Literacy Financial

Sumber : Data diolah pribadi (2025)

Gambar di atas merupakan hasil pra survey dengan pegawai Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Tiga indikator yang menentukan tingkat literasi keuangan digital adalah *Financial Knowledge* (Pengetahuan Keuangan), *Financial Attitude* (Sikap Keuangan), dan *Financial Behaviour* (Perilaku Keuangan) (Desman, 2021). Dari segi pengetahuan keuangan (*finansial knowledge*) digital mencerminkan pemahaman individu terhadap berbagai konsep dan istilah dalam transaksi keuangan digital, misalnya penggunaan e-wallet, QRIS, juga PayLater. Berdasarkan hasil pra-penelitian, sebanyak 62 responden menyatakan memahami istilah umum dalam transaksi keuangan digital, sedangkan 68 responden tidak memahami istilah-istilah tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwasanya terdapat sebagian individu yang belum mempunyai wawasan yang cukup mengenai layanan finansial digital yang kini semakin banyak digunakan.

Pada indikator sikap keuangan (*finansial attitude*) mencerminkan bagaimana individu menilai dan mengambil keputusan terkait keuangan mereka. Salah satu indikator yang diukur dalam penelitian ini adalah apakah individu percaya bahwa mengelola keuangan dengan baik dapat meningkatkan kualitas hidup. Dari hasil penelitian, 130 responden menjawab "Ya", yang menandakan bahwa mayoritas individu mempunyai kesadaran akan pentingnya pengelolaan finansial yang baik. Namun, masih ada 92 responden yang tidak mempunyai sikap positif terhadap pengelolaan finansial, yang bisa berdampak pada kebiasaan finansial mereka.

Sedangkan dalam indikator perilaku keuangan (*finansial behaviour*) menunjukkan bagaimana individu mengimplementasikan wawasan serta sikap finansial dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu aspek yang diukur dalam penelitian ini adalah apakah individu rutin mencatat dan memantau pemasukan serta pengeluaran mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 38 responden memiliki kebiasaan tersebut, sementara lebih dari setengah responden (68 orang) tidak mencatat atau memantau keuangan mereka secara rutin. Hal ini menandakan bahwa meski individu mungkin mempunyai pengetahuan dan sikap keuangan yang baik, belum tentu mereka menerapkannya dalam perilaku sehari-hari.

Menurut (Iskandar, 2019) literasi keuangan bahwasanya *finance can be defined as the art and science of managing money* yang diartikan selaku seni serta wawasan dari pengelolaan keuangan. (Naufal, 2022) menjelaskan bahwa keuangan adalah sebuah pengetahuan untuk mengelola keuangan baik secara individu

maupun kolektif atau badan. Di era digital ini, hal yang menjadi sebuah tuntutan perkembangan globalisasi adalah literasi. Literasi ialah kemampuan untuk memakai keahlian serta potensi dalam memahami informasi ketika melangsungkan kegiatan membaca, menulis serta berhitung pada kehidupan sehari-hari (Ginting, 2020).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kadoya dan Khan (2020) dalam artikel berjudul "Financial Literacy in Japan: New Evidence Using Financial Knowledge, Behavior, and Attitude", literasi keuangan dikaji dengan memisahkan tiga komponennya, yaitu pengetahuan, sikap, dan perilaku keuangan. Penelitian ini menganalisis relasi antara faktor demografi dan sosial ekonomi dengan literasi keuangan di Jepang. Metode yang dipakai ialah kuantitatif, dengan hasil menunjukkan bahwa pendidikan, keseimbangan aset keuangan, dan penggunaan informasi keuangan berpengaruh positif terhadap literasi keuangan, sedangkan kesulitan finansial memberikan dampak negatif pada pengetahuan, sikap, dan perilaku keuangan.

Sementara itu, penelitian oleh (Handini, 2022) yang berjudul "Pengaruh Financial Literacy dan Faktor Sosiodemografi terhadap Perilaku Investasi Individu pada Tenaga Kerja Kesehatan di Kecamatan Penarik", ditujukan guna menelaah pengaruh literasi keuangan serta faktor sosiodemografi pada perilaku pengambilan keputusan investasi individu. Riset ini mengandalkan metode kuantitatif serta membuktikan bahwasanya secara bersama-sama, literasi keuangan juga faktor

sosiodemografi mempunyai pengaruh signifikan dan kuat terhadap perilaku investasi individu pada tenaga kerja kesehatan di Kecamatan Penarik.

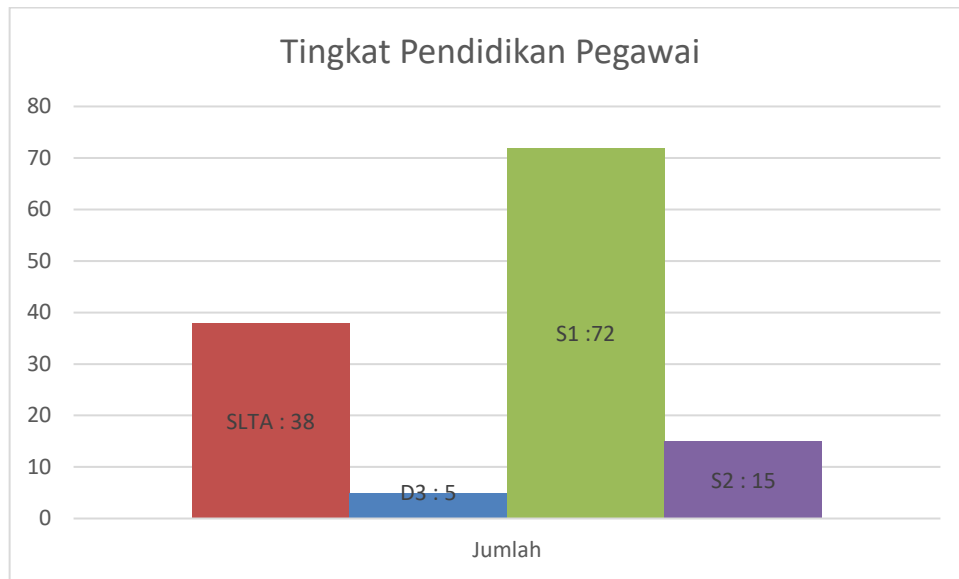
Hasil wawancara penulis dengan bagian kepegawaian Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur pada tanggal 30 Januari 2025 mengungkapkan perbedaan usia dan tingkat pendidikan karyawan secara signifikan memengaruhi kemampuan mereka dalam memahami literasi keuangan digital. Karyawan senior umumnya mengalami hambatan dalam mengakses teknologi keuangan karena keterbatasan pengalaman digital, sementara generasi muda lebih cepat beradaptasi (Prensky, 2001). Selain itu, karyawan dengan pendidikan rendah cenderung kesulitan memahami konsep kompleks seperti keamanan data atau risiko penggunaan fintech (OECD, 2020). Ketimpangan ini dapat menimbulkan kesenjangan digital di lingkungan kerja dan menghambat efisiensi organisasi. Oleh karena itu, Biro Kesejahteraan Rakyat dapat menyusun pelatihan internal berbasis kebutuhan psikografis (gaya hidup, sikap terhadap teknologi), demografis (usia, pendidikan), dan perilaku keuangan (Xiao & Porto, 2017), seperti pelatihan teknologi bagi kelompok usia lanjut atau workshop keuangan digital yang praktis dan aplikatif. Strategi ini penting untuk meningkatkan literasi keuangan digital secara merata, mengurangi risiko finansial, serta mendukung ketahanan organisasi di era transformasi digital (Lusardi & Mitchell, 2014; World Bank, 2022).

Tabel 1.1 Rata Rata Usia Pegawai Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

No.	Generasi	Jumlah
1.	Generasi X	74
2.	Generasi Y (Millenial)	33
3.	Generasi Z	23
TOTAL		130

Sumber : Data diolah pribadi (2025)

Dari Tabel 1.1, mayoritas pegawai Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur berasal dari Generasi X, yaitu sebanyak 74 dari total 130 orang, disusul oleh Generasi Y (33 orang) dan Generasi Z (23 orang). Dominasi Generasi X yang lahir rentang 1965–1980 memperlihatkan bahwasanya mayoritas pegawai berasal dari kategori usia yang relatif senior dan tidak tumbuh dalam lingkungan digital. Kondisi ini berdampak pada rendahnya tingkat adaptasi terhadap teknologi keuangan digital, mengingat keterbatasan pengalaman serta minimnya paparan terhadap perkembangan teknologi saat masa pertumbuhan mereka (Kompasiana, 2024). Mereka cenderung merasa kurang percaya diri menggunakan media digital seperti aplikasi keuangan, dompet digital, dan mobile banking, dibandingkan Generasi Y dan Z yang lebih akrab dengan inovasi berbasis teknologi. Oleh karena itu, struktur demografis ini penting untuk dijadikan pertimbangan dalam merancang strategi pelatihan yang inklusif agar seluruh pegawai dapat meningkatkan literasi keuangan digital secara merata.



Gambar 1.2 Tingkat Pendidikan Pegawai

Sumber : Data diolah pribadi (2025)

Selain faktor usia, jenjang pendidikan juga menjadi bagian aspek yang berefek pada taraf literasi keuangan digital di lingkungan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data yang tersedia, mayoritas pegawai mempunyai riwayat pendidikan Sarjana (S1) sejumlah 72 orang, diikuti oleh lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sejumlah 38 orang, lulusan Magister (S2) sejumlah 15 orang, serta lulusan Diploma 3 (D3) sejumlah 5 orang. Perbedaan tingkat pendidikan ini berpotensi menciptakan kesenjangan dalam pemahaman dan penerapan teknologi keuangan digital di tempat kerja. Pegawai bertaraf pendidikan lebih tinggi umumnya mempunyai akses yang kian baik mengenai informasi finansial juga lebih cepat untuk memahami konsep-konsep keuangan digital. Sebaliknya, pegawai dengan jenjang pendidikan yang lebih rendah mungkin mengalami hambatan dalam mengadopsi sistem keuangan berbasis teknologi karena kurangnya pemahaman terhadap terminologi dan

mekanisme digital. Oleh karena itu, pendekatan pelatihan yang berjenjang sesuai dengan tingkat pendidikan pegawai menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh karyawan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi keuangan.

Aspek psikografis juga berperan penting dalam penggunaan layanan keuangan digital, khususnya aplikasi PayLater, karena mencerminkan gaya hidup, sikap terhadap keuangan, serta kebiasaan konsumsi individu dalam memanfaatkan layanan finansial berbasis digital. Menurut (Kotler & Keller, 2016) segmentasi psikografis berfokus pada nilai, kepribadian, minat, dan gaya hidup yang memengaruhi preferensi dalam pengambilan keputusan finansial. Studi (Sari & Nugroho, 2022) menunjukkan bahwa individu dengan gaya hidup hedonis atau konsumtif lebih cenderung menggunakan PayLater untuk memenuhi kebutuhan non-esensial, seperti belanja fesyen dan hiburan, sementara mereka yang lebih disiplin secara finansial hanya menggunakan layanan ini dalam kondisi darurat.

Selain itu, sikap terhadap risiko juga memengaruhi keputusan penggunaan PayLater, di mana individu dengan taraf literasi keuangan rendah kian rentan melangsungkan transaksi impulsif tanpa perhitungan matang (Lusardi & Mitchell, 2017; Herawati et al., 2023). Sebaliknya, individu dengan kontrol finansial lebih baik umumnya lebih cermat dalam memakai fitur ini. Faktor kepercayaan terhadap teknologi juga berperan, di mana mereka yang merasa nyaman dengan sistem digital lebih cenderung menggunakan PayLater dibandingkan individu yang skeptis terhadap keamanan data dan risiko utang digital (Chatterjee & Sreenivas, 2020). Dengan demikian, pemahaman terhadap faktor psikografis menjadi krusial dalam

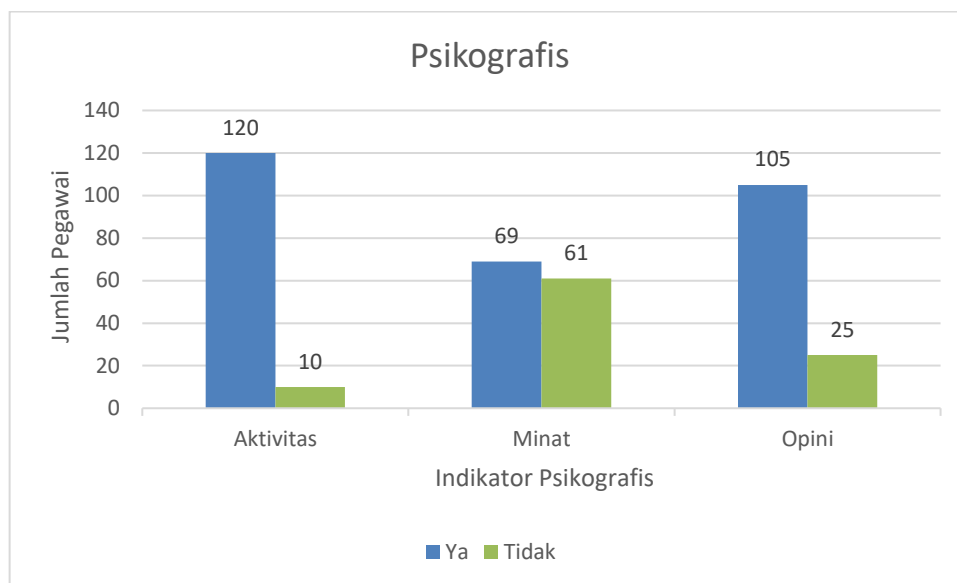
menyusun strategi literasi keuangan digital yang lebih efektif agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi keuangan dengan lebih bijak dan sesuai dengan kapasitas finansial mereka.

Hasil wawancara penulis dengan bagian kepegawaian Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur pada tanggal 30 Januari 2025 menunjukkan bahwa salah satu permasalahan dalam literasi keuangan digital disebabkan oleh faktor psikografis. Secara umum, segmentasi psikografis merupakan pendekatan yang dapat memberikan gambaran spesifik dan realistis mengenai karakteristik individu. Pengetahuan tentang minat, nilai, sikap, serta sifat kepribadian seseorang dapat membantu memahami pandangan dan motivasi potensial individu, yang pada dasarnya berfungsi penting guna menciptakan perilaku keuangan mereka, termasuk pada hal penggunaan teknologi finansial digital.

Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991) menjelaskan bahwasanya perilaku individu terdampak dari tiga faktor utama, yakni sikap terhadap perilaku, norma subjektif, serta persepsi kontrol perilaku. Pada konteks penggunaan teknologi keuangan digital oleh pegawai di Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, teori ini relevan guna memahami sejauh mana sikap positif terhadap literasi keuangan digital, dukungan sosial dari lingkungan kerja, serta rasa percaya diri dalam mengakses layanan keuangan digital, berkontribusi terhadap perilaku aktual mereka dalam mengadopsi teknologi finansial. Misalnya, jika pegawai memiliki pandangan bahwa penggunaan teknologi keuangan dapat

mempermudah pengelolaan keuangan, merasa terdorong oleh lingkungan kerja yang mendukung digitalisasi, dan percaya diri dalam mengoperasikan aplikasi keuangan, maka kemungkinan besar mereka akan mengadopsi perilaku keuangan digital secara aktif. Oleh karena itu, pendekatan berbasis TPB dapat digunakan untuk merancang intervensi yang bukan hanya berpusat pada pengembangan pengetahuan, namun juga pada perubahan sikap, norma sosial, serta persepsi kontrol untuk mendorong perilaku keuangan digital yang positif.

Plummer menekankan bahwa individu yang memiliki gaya hidup aktif cenderung lebih terbuka terhadap inovasi dan perubahan, sedangkan mereka yang kurang tertarik mengeksplorasi fitur baru dalam layanan keuangan digital menunjukkan kecenderungan gaya hidup yang lebih konservatif dalam mengadopsi teknologi. Oleh karena itu, untuk meningkatkan adopsi teknologi keuangan yang lebih optimal, pendekatan berbasis gaya hidup perlu diterapkan, seperti menyesuaikan strategi edukasi dengan preferensi aktivitas dan minat pegawai, serta membangun opini positif melalui pengalaman penggunaan teknologi yang lebih interaktif dan relevan dengan kebutuhan mereka.



Gambar 1.3 Indikasi terjadinya Aspek Psikografis

Sumber : Data diolah pribadi (2025)

Dalam konteks literasi keuangan digital di Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, terdapat tiga indikator utama (Rasmikayati et al., 2021) yang mencerminkan aspek psikografis pegawai dalam mengadopsi teknologi keuangan, yaitu aktivitas, minat, dan opini. Dari segi aktivitas, sebanyak 120 pegawai secara rutin memeriksa saldo atau transaksi melalui aplikasi perbankan digital, sementara sebagian kecil lainnya belum terbiasa menggunakan teknologi ini dalam aktivitas keuangan sehari-hari. Pada indikator minat, hanya 69 pegawai yang tertarik mencoba fitur-fitur baru yang ditawarkan oleh aplikasi keuangan digital, sedangkan 61 lainnya tidak menunjukkan ketertarikan, yang mengindikasikan bahwa meskipun mayoritas pegawai sudah menggunakan layanan keuangan digital, tingkat keinginan mereka untuk mengeksplorasi fitur baru masih terbatas. Sementara itu, dalam indikator opini, sebanyak 105 pegawai setuju bahwa literasi keuangan digital dapat membantu

pengaturan finansial yang lebih baik, sedangkan 25 pegawai lainnya kurang setuju, yang menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar pegawai menyadari pentingnya pemahaman keuangan digital, masih ada yang meragukan manfaatnya.

Dengan demikian, meskipun tingkat penggunaan layanan digital cukup tinggi, minat untuk mengeksplorasi fitur baru masih rendah, dan masih ada pegawai yang belum sepenuhnya yakin akan manfaat literasi keuangan digital, sehingga diperlukan sosialisasi serta pelatihan yang lebih intensif guna meningkatkan pemahaman dan keterampilan pegawai dalam memanfaatkan teknologi keuangan secara optimal. Berdasarkan analisis tiga indikator psikografis, yaitu aktivitas, minat, dan opini, dapat disimpulkan bahwa meskipun mayoritas pegawai di Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur telah aktif menggunakan layanan keuangan digital, minat mereka dalam mengeksplorasi fitur baru masih rendah, dan masih terdapat pegawai yang belum sepenuhnya memahami manfaat literasi keuangan digital.

Permasalahan konkret yang dapat diidentifikasi adalah adanya kesenjangan antara penggunaan teknologi keuangan secara rutin dengan tingkat keterbukaan terhadap inovasi baru, yang dapat menghambat optimalisasi pemanfaatan layanan keuangan digital di lingkungan kerja. Selain itu, masih adanya pegawai yang meragukan manfaat literasi keuangan digital menunjukkan perlunya strategi edukasi yang lebih efektif agar seluruh pegawai dapat mengatur finansial lebih baik menggunakan teknologi yang tersedia. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan langkah-langkah konkret seperti sosialisasi berkelanjutan, pelatihan yang lebih

interaktif, serta pendekatan berbasis kebutuhan pegawai agar adopsi teknologi keuangan digital dapat dilakukan secara lebih merata dan optimal.

Pendekatan psikografi yang mana nilai ialah suatu dasar utama terkait hal persepsi serta penilaian individu yang menjadi basis penetapan keputusan konsumen yang mencakup alokasi waktu, upaya dan dana (Suharyanto, 2023). Segmentasi psikografis dibedakan menjadi beberapa kelompok misalnya, nilai : pimpinan masyarakat, pendidikan, golongan, lalu gaya hidup: modern, tradisional, kuno dan sebagainya, yang terakhir kepribadian: penggemar, pecandu, atau pemerhati dari suatu produk. Menurut (Nursya et al., 2019) segmentasi psikografi adalah mengklasifikasikan individu pada kelompok kelompok yang berlainan berdasarkan kelas sosial, gaya hidup, serta karakteristik personal. Psikografi adalah sebuah teknik utama meneliti konsumen guna menetapkan bagaimana pasar di pangsa berdasarkan kecondongan kelompok pada pasar yang ditentukan dengan mengandalkan faktor psikologis, sosiologis serta antropologis, misalnya kegunaan yang diharapkan, konsep diri, gaya hidup (Sartika & Abdillah, 2020). Pada penerapannya, psikografi dipakai sebagai tolak ukur gaya hidup konsumen dengan menelaah kegiatan, minat, serta pendapat.

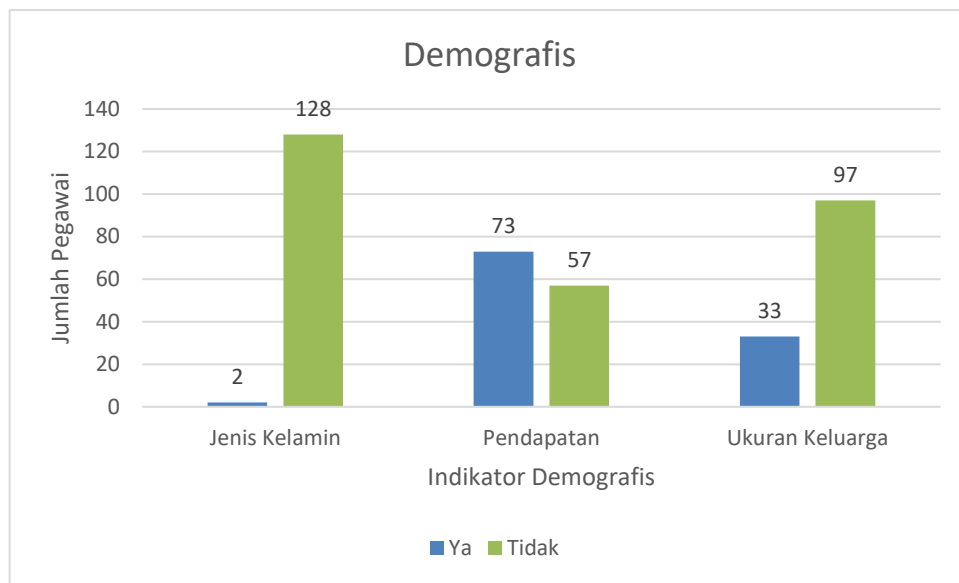
Menurut penelitian (A. Abdurrahman & Nugroho, 2024) menjelaskan faktor psikografis, seperti sikap, kepercayaan, nilai-nilai pribadi, dan gaya hidup, memengaruhi perilaku keuangan dan literasi keuangan digital. Dalam era digital, pemahaman terhadap keuangan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor demografis, tetapi juga oleh faktor psikografis yang mencakup keinginan untuk mengakses

teknologi baru, keterbukaan terhadap perubahan, dan bagaimana individu memandang risiko serta kemudahan dalam menggunakan teknologi keuangan.

Penelitian ini mengidentifikasi bahwa individu dengan sikap positif terhadap teknologi dan gaya hidup yang adaptif terhadap perubahan umumnya mempunyai taraf literasi keuangan digital yang lebih tinggi. Sementara itu, bagi yang memiliki ketidakpercayaan terhadap sistem digital atau lebih konservatif dalam pengelolaan keuangan lebih rendah tingkat literasi keuangan digitalnya. Temuan ini menunjukkan pentingnya memahami faktor psikografis dalam upaya meningkatkan literasi keuangan digital melalui program edukasi yang lebih sesuai dengan karakteristik psikologis individu.

Wawancara penulis dengan bagian kepegawaian Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur pada 30 Januari 2025 memperlihatkan bahwasanya permasalahan literasi finansial digital bukan hanya terdampak faktor psikografis namun faktor demografis pula. Secara umum, segmentasi demografis ialah salah satu cara yang dapat menghadirkan gambaran spesifik mengenai karakteristik individu berdasarkan variabel seperti jenis kelamin, pendapatan, dan ukuran keluarga. Pengetahuan tentang bagaimana faktor-faktor ini memengaruhi preferensi, kebiasaan, dan keputusan dalam menggunakan layanan keuangan digital bisa membantu guna menyusun taktik edukasi yang kian efektif. Dalam konteks ini, persepsi pegawai terhadap pengaruh gender, tingkat pendapatan, dan tanggungan keluarga dalam penggunaan aplikasi keuangan digital menjadi faktor yang menentukan tingkat adopsi teknologi keuangan. Oleh karena itu, pemahaman yang

lebih mendalam mengenai segmentasi demografis ini bisa berperan sebagai landasan guna mengembangkan program literasi keuangan digital yang lebih sesuai sasarannya dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok pegawai..



Gambar 1.4 Indikasi terjadinya Aspek Demografis

Sumber : Data diolah pribadi (2025)

Dalam konteks penggunaan layanan keuangan digital di lingkungan pegawai, terdapat tiga indikator utama (Rasmikayati et al., 2021) yang mencerminkan aspek demografis dalam preferensi dan keputusan adopsi teknologi keuangan, yaitu jenis kelamin, pendapatan, dan ukuran keluarga. Dari segi jenis kelamin, sebanyak 73 pegawai merasa bahwa gender mereka memengaruhi preferensi dalam menggunakan layanan keuangan digital, sementara 128 pegawai lainnya tidak merasakan adanya pengaruh, yang menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar pegawai menganggap layanan ini bersifat netral terhadap gender, masih ada yang merasakan dampaknya.

Pada indikator pendapatan, hanya 33 pegawai yang menyatakan bahwa aplikasi keuangan digital membantu mereka dalam mengelola pendapatan dengan lebih baik, sedangkan 57 pegawai lainnya tidak merasakan manfaat yang signifikan, mengindikasikan bahwa perbedaan dalam kebiasaan keuangan atau tingkat literasi keuangan dapat memengaruhi pemanfaatan layanan digital ini. Sementara itu, dalam indikator ukuran keluarga, sebanyak 97 pegawai merasa bahwa jumlah anggota keluarga memengaruhi keputusan mereka dalam menggunakan aplikasi keuangan digital, sementara 97 pegawai lainnya tidak merasakan adanya pengaruh, menunjukkan bahwa dampak ukuran keluarga terhadap penggunaan layanan keuangan digital bervariasi tergantung pada kebutuhan finansial individu dan kompleksitas pengelolaan keuangan rumah tangga.

Dengan demikian, meskipun mayoritas pegawai telah mengadopsi layanan keuangan digital, masih terdapat variasi dalam preferensi dan keputusan berdasarkan faktor demografis, hingga dibutuhkan strategi edukasi serta sosialisasi yang semakin terarah agar pemanfaatan teknologi keuangan digital bisa dilaksanakan dengan lebih merata juga optimal selaras dengan kebutuhan masing-masing pegawai.

Perkembangan teknologi dan digitalisasi keuangan telah memunculkan kemudahan untuk masyarakat guna menjangkau layanan finansial, namun adopsinya masih dipengaruhi oleh berbagai faktor psikografis, demografis, dan perilaku finansial. Meskipun angka inklusi keuangan di Indonesia meningkat, masih terdapat kesenjangan dengan literasi keuangan yang mengindikasikan

perlunya edukasi yang lebih intensif, terutama bagi generasi muda yang mendominasi pengguna fintech.

Faktor demografis misalnya jenis kelamin, pemasukan, serta ukuran keluarga juga berperan untuk menentukan preferensi dan keputusan pegawai dalam memakai layanan finansial digital, mengindikasikan bahwasanya pemanfaatan teknologi keuangan tidak bersifat universal dan masih bergantung pada karakteristik individu. Selain itu, tantangan dalam penggunaan fintech, seperti tingginya bunga pinjaman *online* serta risiko keamanan data, semakin menekankan pentingnya peningkatan literasi finansial digital supaya masyarakat bisa memakai layanan finansial dengan bijak. Maka dari itu, dibutuhkan cara edukasi yang semakin terarah, baik bagi masyarakat umum maupun pegawai di lingkungan biro pemerintahan, guna memastikan bahwa transformasi digital di sektor keuangan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

Demografi merupakan bentuk pengklasifikasian berkaitan dengan masalah kependudukan. Bentuk pengklasifikasian yang diambil adalah jenis kelamin, agama, profesi, besar keluarga, umur, tipe keluarga, pemasukan, pendidikan, kepemilikan rumah, ras, serta siklus hidup keluarga (Sartika & Abdillah, 2020). Berdasarkan Donald J. Bougue, demografi diartikan sebagai pengkategorian secara statistik terkait jumlah, komposisi, distribusi penduduk, serta transformasinya selaku akibat dari beroperasinya elemen-elemen pertumbuhan penduduk. Artinya demografi ialah penjelasan mengenai penduduk, utamanya terkait kelahiran, kematian, serta migrasi (Suhardi, 2019). Faktor demografi ialah sebuah kajian studi

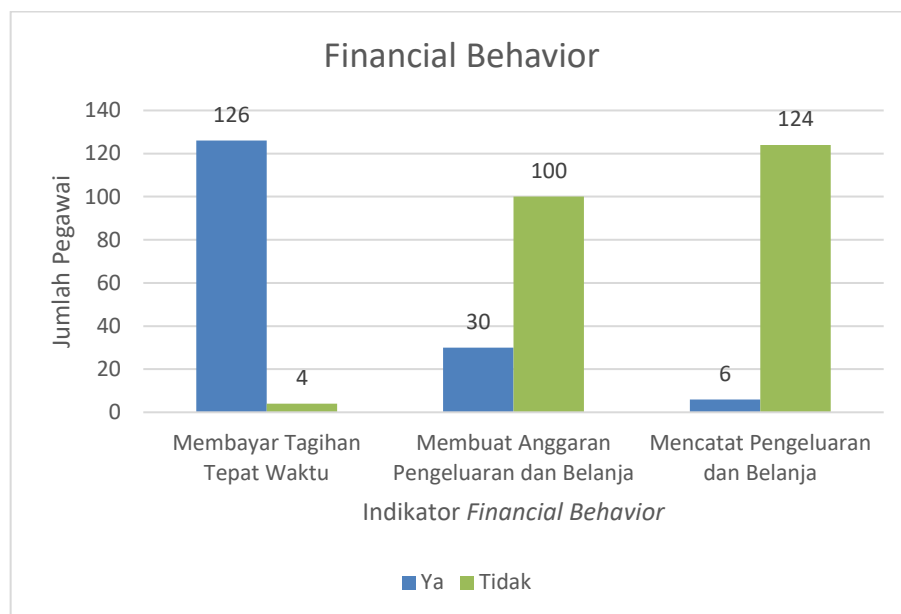
yang menelaah mengenai karakteristik, sikap, serta perilaku individu yang terpengaruh oleh beragam faktor. Faktor-faktor demografi yang berpengaruh antara lain jenis kelamin, umur, taraf pendidikan, taraf permasukan, serta profesi (Munawar et al., 2020).

Menurut riset (Sudiro & Asandimitra, 2022) dengan judul “Pengaruh *Financial Literacy*, Uang Elektronik, Demografi, Gaya Hidup, Dan Kontrol Diri Terhadap Perilaku Konsumtif Generasi Milenial”. Riset ini ditujukan guna menguji aspek atau variabel independen yang tersusun dari *finansial literacy*, uang elektronik, demografi, gaya hidup, serta kontrol diri pada perilaku konsumtif yang berperan selaku variabel dependen, dengan generasi milenial di Kota Surabaya selaku objek. Riset ini memakai metode kuantitatif, yang memiliki hasil variabel *finansial literacy* juga kontrol diri memiliki pengaruh yang signifikan pada perilaku konsumtif generasi milenial di Kota Surabaya. Di samping itu, ada variabel uang elektronik, demografi, serta gaya hidup yang berpengaruh signifikan pula pada perilaku konsumtif generasi milenial di Kota Surabaya.

Dalam memahami perilaku keuangan pegawai, Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991) menawarkan kerangka yang menjelaskan bahwasanya tindakan individu terpengaruh oleh tiga faktor utama, yakni sikap terhadap perilaku, norma subjektif, serta persepsi atas kontrol diri. Penerapan teori ini dalam konteks pegawai Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dapat membantu menjelaskan mengapa sebagian pegawai cenderung konsisten dalam membayar tagihan tepat waktu, namun tidak menunjukkan kedisiplinan yang sama

dalam menyusun anggaran atau mencatat pengeluaran. Hal ini dapat terjadi karena mereka memiliki sikap positif terhadap kewajiban membayar tagihan, namun kurang menyadari pentingnya pencatatan keuangan. Selain itu, jika lingkungan sosial tidak memberikan tekanan atau contoh yang mendukung kebiasaan pengelolaan keuangan yang tertib, maka norma subjektif untuk melakukannya juga menjadi lemah. Sementara itu, rendahnya keyakinan diri dalam mengelola keuangan secara sistematis juga dapat mengurangi persepsi kontrol, sehingga perilaku pencatatan dan perencanaan anggaran sulit diwujudkan. Dengan demikian, pendekatan TPB menekankan bahwasanya transformasi perilaku keuangan bukan hanya membutuhkan penambahan pengetahuan, namun juga perlu diarahkan ke pembentukan sikap yang mendukung, norma sosial yang positif, dan peningkatan rasa percaya diri terhadap kemampuan mengelola keuangan.

Selain itu, heuristik mental accounting dapat mempengaruhi bagaimana individu mengalokasikan penghasilan mereka ke berbagai pos pengeluaran tanpa mempertimbangkan keseluruhan kondisi finansial secara objektif. Oleh karena itu, dalam meningkatkan literasi keuangan digital dan kebiasaan finansial yang lebih baik, pendekatan edukasi yang tidak hanya berfokus pada aspek rasionalitas tetapi juga mengatasi bias psikologis sangat diperlukan agar pegawai dapat lebih efektif dalam mengelola keuangan mereka.



Gambar 1 .5 Indikasi terjadinya Aspek Financial Behavior

Sumber : Data diolah pribadi (2025)

Dalam konteks *Financial Behavior* di Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, terdapat indikator menurut (Fitri Arianti, 2020) dan (Brilianti & Lutfi, 2020) mencerminkan aspek *finansial behavior* pegawai dalam mengadopsi teknologi keuangan digital, yakni melunasi tagihan tepat waktu, menyusun anggaran pengeluaran dan belanja, mencatat pengeluaran dan belanja, mengalokasikan dana untuk pengeluaran tidak terduga, menabung rutin, serta mengomparasikan harga antara toko atau swalayan.

Perilaku keuangan pegawai memiliki peran penting dalam memastikan kesejahteraan finansial, terutama bagi pegawai yang harus mengelola pendapatan dan pengeluaran mereka dengan bijak. Salah satu aspek utama dalam financial behavior adalah bagaimana seseorang mengelola kewajiban keuangan serta perencanaan anggaran secara disiplin. Berdasarkan data yang diperoleh, dari

wawancara terdapat tiga indikator utama yang menjadi fokus pada riset ini, yaitu melunasi tagihan tepat waktu, menyusun anggaran pengeluaran dan belanja, serta mencatat pengeluaran. Indikator pertama, membayar tagihan tepat waktu, mencerminkan kedisiplinan dalam memenuhi kewajiban finansial tanpa keterlambatan.

Berdasarkan data yang dihimpun, sebanyak 126 pegawai menyatakan bahwa mereka selalu membayar tagihan sesuai dengan jatuh tempo. Hal ini menunjukkan tingkat kesadaran yang cukup tinggi dalam mengelola pembayaran rutin, seperti listrik, air, cicilan, atau tagihan lainnya. Namun, masih terdapat sebagian kecil individu yang mungkin mengalami kesulitan atau kurang memiliki kebiasaan dalam hal ini. Indikator kedua, membuat anggaran pengeluaran dan belanja, mengukur sejauh mana seseorang merencanakan penggunaan uang sebelum melakukan pembelian atau pengeluaran. Dari data yang diperoleh, hanya 30 pegawai yang selalu membuat anggaran sebelum berbelanja atau mengeluarkan uang. Angka ini tergolong rendah dibandingkan indikator lainnya, yang mengindikasikan bahwa masih banyak pegawai yang belum menerapkan kebiasaan perencanaan anggaran pada kesehariannya.

Perencanaan anggaran yang baik bisa mendorong seseorang guna mengatur finansial dengan lebih efisien serta meminimalisasi pengeluaran yang tidak penting. Indikator ketiga, mencatat pengeluaran dan belanja, menjadi aspek penting dalam memantau kondisi keuangan seseorang. Berdasarkan data, sebanyak 64 pegawai secara rutin mencatat setiap pengeluaran yang dilakukan, baik harian maupun

bulanan. Meskipun jumlahnya lebih tinggi dibandingkan dengan pegawai yang membuat anggaran, tetap menunjukkan bahwa pencatatan pengeluaran belum menjadi kebiasaan umum di kalangan pegawai Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Hasil analisis bersama pihak kepegawaian Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwasanya ketiga indikator dalam penelitian ini merefleksikan perilaku pegawai dalam mengelola keuangan pribadinya. Kesadaran tinggi dalam membayar tagihan tepat waktu mencerminkan adanya rasa tanggung jawab finansial yang cukup baik. Namun, masih rendahnya praktik menyusun anggaran dan mencatat pengeluaran mengindikasikan perlunya peningkatan edukasi mengenai pentingnya perencanaan keuangan untuk mendukung kesejahteraan finansial jangka panjang. Jika ketiga indikator tersebut dipahami dan diterapkan secara konsisten, maka individu akan lebih mampu mengendalikan kondisi keuangannya, menghindari beban utang yang tidak diperlukan, serta mencapai kestabilan keuangan yang lebih optimal.

Perilaku keuangan mempunyai korelasi erat dengan individu melangsungkan pengaturan serta sumber daya dari finansial yang dipunyai. Perilaku keuangan ialah sikap yang lahir karena kecakapan guna mengonsiderasikan juga merancang cara untuk mendapat anggaran supaya bisa menabung dengan menerima segala risiko finansial juga membuat keselarasan dengan keperluan serta anggaran yang dibutuhkan. Menurut (Fiika et al., 2022) perilaku keuangan ialah perolehan yang berasal dari berbagai macam ilmu. Struktur

untuk ilmu pertama ialah psikologi, psikologi dipakai untuk menganalisis sebuah perilaku seseorang juga pikiran serta proses dari psikis bisa terpengaruh dengan hadirnya fisik juga lingkungan luar individu. Struktur ilmu kedua adalah keuangan, selaku sebuah sistem keuangan, pemakaian dari sumber daya distribusi. Lalu struktur ilmu terakhir adalah sosiologi dengan sistematis, tersusun dari perilaku manusia atau kelompok dengan menegaskan untuk pengaruh sosial juga sikap serta perilaku masyarakat.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan sejumlah studi sebelumnya yang sama-sama menyoroti literasi keuangan dan pengaruh faktor individu, seperti demografi, perilaku keuangan, serta literasi digital. (Kadoya dan Khan, 2020) serta (Mawad, 2022) misalnya menunjukkan bahwa faktor demografis dan perilaku memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman dan praktik keuangan seseorang. Sementara itu, penelitian (Handini, 2022) turut membahas pengaruh faktor sosiodemografi terhadap perilaku investasi, yang selaras dengan pendekatan variabel perilaku keuangan dalam studi ini. Selain itu, (Rahayu, 2022) dan (Gautam, 2022) menekankan pentingnya literasi keuangan digital serta teknologi guna menciptakan perilaku keuangan, yang juga menjadi fokus dalam penelitian ini.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keunikan tersendiri karena menggabungkan faktor psikografis seperti gaya hidup, minat, dan sikap terhadap teknologi bersama dengan faktor demografis dan perilaku keuangan sebagai variabel independen. Tujuannya adalah untuk menjelaskan pengaruh ketiganya terhadap literasi keuangan digital secara lebih menyeluruh. Objek penelitian ini pun

berbeda, yakni pegawai pemerintah daerah di Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, yang masih jarang berperan selaku subjek pada studi serupa. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya memperluas cakupan empiris terkait literasi keuangan digital, tetapi juga menawarkan pendekatan multidimensional dengan mempertimbangkan karakteristik psikologis dan perilaku individu dalam konteks sektor publik.

Berangkat dari realitas yang ada, penting untuk memahami bagaimana karakteristik individu, baik dari sisi psikografis maupun demografis, memengaruhi tingkat literasi keuangan digital seseorang. Dalam berbagai penelitian sebelumnya, fokus kajian lebih banyak diarahkan pada aspek literasi keuangan digital itu sendiri, namun belum banyak yang mengaitkannya secara langsung dengan latar belakang psikologis dan sosial individu. Maka dari itu, riset ini hadir guna mengisi kesenjangan tersebut dengan menelaah bagaimana faktor-faktor seperti gaya hidup, sikap terhadap teknologi, usia, dan tingkat pendidikan turut memengaruhi kecakapan individu guna memahami serta mendayagunakan layanan keuangan digital secara efektif. Hal ini yang menguatkan penulis agar membawa tajuk **“Pengaruh Faktor Psikografis dan Demografis terhadap Digital Financial Literacy”** sebagai fokus kajian dalam penelitian ini.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah psikografis berpengaruh pada *digital financial literacy*?

2. Apakah demografis berpengaruh pada *digital financial literacy*?
3. Apakah *financial behavior* berpengaruh pada *digital financial literacy*?

1.3. Tujuan Penelitian

Atas dasar penyusunan permasalahan tersebut, maka tujuan yang diproyeksikan untuk dicapai pada riset ini ialah meliputi:

1. Guna menguji serta menganalisis psikografis yang berpengaruh terhadap *digital financial literacy*
2. Guna menguji serta menganalisis demografis yang berpengaruh terhadap *digital financial literacy*
3. Guna menguji serta menganalisis *financial behavior* yang berpengaruh terhadap *digital financial literacy*

1.4. Manfaat penelitian

1. Secara Teoritis

a. Bagi peneliti

Riset ini diproyeksikan mampu memperluas ilmu, wawasan, serta evaluasi pada implementasi secara langsung mengenai teori yang berhubungan dengan isu yang tengah terjadi.

b. Bagi Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

Penelitian ini diharapkan mampu mengedukasi pengaruh dari segmentasi psikografi, demografi, dan terhadap *digital financial literacy*

2. Secara Praktis

Manfaat riset ini diproyeksikan dapat menghadirkan saran serta kontribusi lebih lanjut terkait faktor psikografis, demografis, dan *financial behavior* terhadap *digital finansial literacy* pada pegawai Biro Kesejahteraan rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur